

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk memetakan sejauh mana persoalan yang diteliti telah dijawab oleh peneliti sebelumnya, sekaligus menemukan celah yang dapat diisi oleh penelitian ini. Tujuh penelitian dipilih berdasarkan kriteria berikut: menggunakan pendekatan kualitatif, diterbitkan dalam kurun lima tahun terakhir, serta terindeks SINTA atau Scopus. Lima di antaranya berasal dari jurnal nasional terindeks SINTA dan dua dari jurnal internasional terindeks Scopus.

Ketujuh penelitian tersebut dipilih agar mencakup tiga sisi yang saling melengkapi. Sisi pertama adalah penelitian yang menggunakan teori Manajemen Privasi Komunikasi pada konteks pengungkapan informasi berstigma di Indonesia (Jurnal 1, 2, 3, dan 5). Sisi kedua adalah penelitian yang mengoperasionalkan dimensi pengungkapan diri DeVito ke dalam data kualitatif (Jurnal 4). Sisi ketiga adalah penelitian yang secara langsung meneliti korban kekerasan berbasis citra dan *deepfake* seksual melalui wawancara (Jurnal 6 dan 7). Pemetaan lengkapnya disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu

No	Item	Jurnal 1	Jurnal 2	Jurnal 3	Jurnal 4	Jurnal 5	Jurnal 6	Jurnal 7
1	Judul Artikel Ilmiah	Pengungkapan Diri dan Manajemen Privasi Komunikasi Pasien Covid-19	Manajemen Komunikasi Privasi Perempuan Tentang Cyber Sexual Harassment	Manajemen Privasi Komunikasi Perempuan Korban Kekerasan Seksual	Self-Disclosure Mahasiswa Ilmu Komunikasi di Instagram: Studi Kualitatif tentang Ekspresi Diri di Era Digital	Manajemen Privasi Komunikasi Pengguna Fitur Spaces di Media Sosial X (Studi pada Mahasiswa dalam Melakukan Pengungkapan Diri Mengenai Hubungan Percintaan)	Disclosure Decisions and Help-Seeking Experiences Amongst Victim-Survivors of Non-Consensual Intimate Image Distribution	Sexualized <i>Deepfake</i> Abuse: Perpetrator and Victim Perspectives on the Motivations and Forms of Non-Consensually Created and Shared Sexualized <i>Deepfake</i> Imagery
2	Nama Peneliti, Tahun Terbit, dan Penerbit	Bate, A. P., & Amrullah, H. F. (2022). Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 19(2), 197–216. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. DOI: 10.24002/jik.v19i2.4382. Terindeks SINTA.	Saptyasari, A., Ula, E. K., & Dayanti, L. D. (2023). Jurnal Media dan Komunikasi (Medkom), 3(1), 1–15. Universitas Airlangga. DOI: 10.20473/medkom.v3i1.38309. Terindeks SINTA.	Lewi, O., & Raras A. H., B. (2024). Jurnal Komunikasi Pemberdayaan, 3(1), 1–14. STPM APMD Yogyakarta. DOI: 10.47431/jkp.v3i1.385. Terindeks SINTA.	Rahmad, W. O. D. C., Mau, M., & Akbar, M. (2025). J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi, 12(1), 9–15. Universitas Bina Sarana Informatika. DOI: 10.31294/kom.v12i1.22632. Terdaftar SINTA.	Rahman, A. A., & Wijaya, B. H. S. (2025). Jurnal Komunikasi Massa, 18(2), 73–84. Universitas Sebelas Maret. Terdaftar SINTA.	Mclocklin, G., Kellezi, B., Stevenson, C., & Mackay, J. (2024). Victims & Offenders. Taylor & Francis. DOI: 10.1080/15564886.2024.2329107. Terindeks Scopus.	Flynn, A., Powell, A., Eaton, A., & Scott, A. J. (2025). Journal of Interpersonal Violence. SAGE. DOI: 10.1177/08862605251368834. Terindeks Scopus.
3	Fokus Penelitian	Pengelolaan privasi pasien Covid-19 dalam memutuskan membuka atau menutup status penyakitnya.	Eksplorasi pengelolaan privasi perempuan korban pelecehan seksual siber ketika menceritakan pengalamannya kepada rekan curhat.	Manajemen privasi komunikasi pada perempuan korban kekerasan seksual berusia 18–24 tahun.	Praktik pengungkapan diri mahasiswa Ilmu Komunikasi di Instagram sebagai sarana ekspresi diri.	Pengelolaan privasi mahasiswa ketika melakukan pengungkapan diri mengenai hubungan percintaan melalui fitur Spaces di media sosial X.	Keputusan pengungkapan dan pengalaman mencari bantuan pada penyintas penyebaran citra intim non-konsensual.	Motivasi pelaku serta bentuk pembuatan dan penyebaran citra <i>deepfake</i> seksual tanpa persetujuan, beserta perspektif korban.
4	Teori	<i>Communication Privacy Management</i> (Petronio).	Manajemen Komunikasi Privasi (Petronio), dengan lima prinsip.	<i>Communication Privacy Management</i> (Petronio).	Konsep self-disclosure DeVito (lima dimensi) dan Johari Window.	<i>Communication Privacy Management</i> (Petronio).	Perspektif psikologi sosial mengenai stigma dan identitas sosial; tidak menggunakan CPM.	Kerangka kekerasan berbasis citra (image-based sexual abuse); tidak menggunakan CPM.

No	Item	Jurnal 1	Jurnal 2	Jurnal 3	Jurnal 4	Jurnal 5	Jurnal 6	Jurnal 7
5	Metode Penelitian	Kualitatif dengan metode studi kasus.	Kualitatif eksploratif, metode fenomenologi, analisis transendental Husserl; wawancara, observasi, dan dokumentasi; triangulasi sumber dan teknik.	Kualitatif dengan metode studi kasus; wawancara semi-terstruktur terhadap tiga perempuan korban.	Kualitatif deskriptif; observasi media sosial, wawancara mendalam, dan dokumentasi unggahan.	Kualitatif.	Kualitatif; wawancara semi-terstruktur dengan penyintas dewasa di Inggris.	Kualitatif; 25 wawancara daring dengan 10 pelaku dan 15 korban di Australia; purposive sampling; praktik wawancara berperspektif trauma.
6	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan	Sama-sama menggunakan CPM sebagai teori utama, sama-sama memakai metode studi kasus, dan sama-sama meneliti pengungkapan informasi yang melekat stigma sosial.	Subjeknya sama-sama perempuan korban kekerasan seksual berbasis teknologi; sama-sama menyoroti perpindahan status informasi dari kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan bersama.	Sama-sama meneliti perempuan korban kekerasan seksual dengan CPM dan metode studi kasus; kelompok usia subjek beririsan; sama-sama menyoroti kriteria budaya dan rasio manfaat-risiko.	Sama-sama mengoperasikan lima dimensi self-disclosure DeVito ke dalam data kualitatif; sama-sama menggabungkan wawancara dengan dokumentasi jejak media sosial.	Sama-sama memadukan CPM dengan fokus pada pengungkapan diri; sama-sama meneliti pengungkapan yang berlangsung di ruang digital dengan audiens yang sulit dikendalikan.	Sama-sama menempatkan keputusan pengungkapan korban kekerasan berbasis citra sebagai objek kajian, dan sama-sama menemukan bahwa pengungkapan merupakan keputusan yang diperhitungkan, bukan reaksi spontan.	Satu-satunya rujukan yang objeknya persis <i>deepfake</i> seksual dengan data wawancara langsung dari korban; menjadi acuan penting bagi prosedur wawancara yang aman pada topik sensitif.
7	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan	Informasi privat yang diteliti berupa status kesehatan yang sejak awal dimiliki dan dikendalikan sendiri oleh subjek. Pada penelitian ini, informasi privat justru telah direbut dan disebarkan pihak lain sebelum korban sempat	Metodenya fenomenologi, bukan studi kasus, sehingga tidak terikat pada batas satu kasus. Bentuk kekerasannya berupa pelecehan langsung dari pelaku yang dikenali, bukan manipulasi citra oleh pelaku anonim. Tidak menggunakan dimensi self-disclosure DeVito.	Konteksnya kekerasan seksual konvensional yang terjadi secara luring, bukan kekerasan berbasis citra sintesis. Melibatkan tiga informan, bukan kasus tunggal. Tidak memerikan kualitas	Konteks pengungkapannya bersifat sukarela dan positif berupa ekspresi diri, sedangkan penelitian ini meneliti pengungkapan atas pengalaman traumatis yang sarat risiko sosial. Tidak menggunakan CPM sehingga tidak menjelaskan pembentukan aturan privasi.	Informasi yang diungkap bersifat personal namun tidak traumatis, dan pengungkapan dilakukan atas kehendak sendiri. Subjeknya kelompok, bukan kasus tunggal, dan tidak berkedudukan sebagai korban.	Berpijak pada disiplin psikologi dan viktimologi dengan orientasi rekomendasi kebijakan, bukan pembacaan komunikasi. Konteks hukum dan sosialnya Inggris, bukan Indonesia. Tidak membedah dimensi pengungkapan.	Fokusnya pada motivasi pelaku dan tipologi bentuk kekerasan, bukan pada proses komunikasi korban dalam mengungkapkan pengalamannya. Berlatar Australia yang telah memiliki kriminalisasi khusus atas <i>deepfake</i> seksual.

No	Item	Jurnal 1	Jurnal 2	Jurnal 3	Jurnal 4	Jurnal 5	Jurnal 6	Jurnal 7
		menyusun aturan apa pun.		pengungkapan melalui dimensi DeVito.				
8	Hasil Penelitian	Pasien yang mencemaskan isolasi dan stigma sosial memperlakukan statusnya sebagai informasi pribadi, sedangkan pasien yang termotivasi ikut menekan penularan memperlakukannya sebagai informasi publik. Media sosial dinilai sebagai sarana pengungkapan yang tepat karena memberikan dukungan virtual dengan turbulensi batas yang minimal.	Perempuan dapat mengalami berbagai jenis pelecehan seksual siber, dan kedekatan dengan pelaku memengaruhi jenisnya. Manajemen privasi komunikasi menjadi semakin rumit ketika korban semakin dekat dengan pelaku, sebab pelaku memiliki dominasi untuk mengendalikan informasi pribadi korban.	Korban cenderung mengungkapkan informasi pribadi kepada teman dibandingkan kepada keluarga. Tindakan menyalahkan korban dan cara pandang konservatif keluarga mendorong korban menutup informasi. Aturan privasi dipengaruhi kriteria budaya, motivasi, manfaat-risiko, dan kontekstual. Ketiadaan aturan koordinasi yang jelas menimbulkan turbulensi batas informasi pribadi.	Instagram berfungsi sebagai medium pengelolaan citra diri. Tingkat keterbukaan dipengaruhi kepercayaan diri, pengaturan citra melalui filter, dan pola interaksi dengan audiens. Akun kedua digunakan sebagai bagian dari strategi manajemen citra, bukan sekadar pelarian dari norma sosial.	Informan mengelola privasi dengan mengungkapkan informasi pribadi secara selektif, meliputi foto profil, identitas, lokasi, dan data akademik. Bersamaan dengan itu, informan menetapkan batasan mengenai informasi yang tidak boleh diketahui publik. Penetapan batas tersebut memperlihatkan kendali informan atas informasi pribadinya, termasuk menyaring audiens Spaces agar terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Informan juga menerapkan pengelolaan dialektis dengan menimbang secara cermat informasi mana yang layak dibuka kepada publik guna memperkecil risiko turbulensi privasi.	Keputusan korban untuk mengungkapkan pengalaman dan mencari bantuan dibentuk oleh hambatan berlapis, mencakup antisipasi penghakiman, rasa malu, serta pengalaman negatif pada pengungkapan sebelumnya. Penelitian menghasilkan rekomendasi bagi praktisi untuk meningkatkan aksesibilitas dukungan.	Memetakan beragam motivasi pelaku serta bentuk pembuatan dan penyebaran citra <i>deepfake</i> seksual tanpa persetujuan, sekaligus menghadirkan perspektif korban atas peristiwa yang dialaminya.

Sumber: diolah peneliti (2026)

2.2 Teori Manajemen Privasi Komunikasi

Landasan teori dalam penelitian ini adalah Teori Manajemen Privasi Komunikasi (Communication Privacy Management, selanjutnya disingkat CPM) yang dikembangkan Sandra Petronio. Teori ini dipilih karena persoalan yang diteliti pada dasarnya bukan persoalan mengapa seseorang menderita, melainkan persoalan bagaimana seseorang memutuskan apa yang boleh diketahui orang lain mengenai penderitaannya. CPM secara khusus menyediakan penjelasan sistematis mengenai proses tersebut. Uraian berikut disusun mulai dari latar belakang kelahiran teori, akar teoretisnya, asumsi dasarnya, kelima prinsip pokoknya, hingga perkembangan dan kritik terhadapnya, dan ditutup dengan penerapannya pada penelitian ini.

CPM lahir dari kegelisahan Petronio terhadap arah kajian keterbukaan diri (*self-disclosure*) pada dekade 1970-an dan 1980-an. Pada masa itu, kajian keterbukaan diri berkembang pesat namun cenderung memusatkan perhatian pada tindakan membuka informasi dan pada individu yang membukanya. Pertanyaan yang lazim diajukan adalah seberapa banyak seseorang membuka diri, apa yang mendorongnya, dan apa akibatnya bagi hubungan yang ia jalani. Petronio menilai fokus semacam itu menyisakan dua kekosongan penting. Pertama, kajian tersebut memperlakukan keterbukaan seolah-olah merupakan peristiwa tunggal yang selesai begitu informasi disampaikan, padahal informasi terus bergerak setelah diucapkan. Kedua, kajian tersebut kurang memberi tempat pada pihak penerima informasi, padahal begitu informasi berpindah tangan, penerima ikut menentukan nasib informasi tersebut.

Berangkat dari kegelisahan itu, pada 1991 Petronio memperkenalkan model yang semula ia namai Manajemen Batas Komunikasi (*Communication Boundary Management*). Model ini menggeser titik perhatian dari tindakan membuka menjadi proses mengelola. Pada 2002, melalui buku *Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure*, Petronio menyajikan teorinya secara utuh dan mengganti namanya menjadi Manajemen Privasi Komunikasi. Perubahan nama tersebut bukan sekadar persoalan penyebutan. Istilah “privasi” dipilih untuk menegaskan bahwa yang dikelola bukan hanya batas dalam pengertian teknis, melainkan hak seseorang atas

informasi mengenai dirinya. Sejak saat itu jangkauan teori ini juga meluas, dari semula memusatkan perhatian pada hubungan pasangan suami istri menjadi mencakup hubungan pertemanan, keluarga, kelompok, organisasi, hingga interaksi di ruang digital, sehingga Petronio kemudian menyebutnya sebagai makroteori.

Pergeseran istilah lain yang tidak kalah penting adalah penggantian frasa “keterbukaan diri” menjadi “informasi privat”. Frasa keterbukaan diri mengandaikan bahwa yang dibuka selalu berupa informasi tentang diri sendiri. Kenyataannya, informasi yang dikelola seseorang kerap juga menyangkut orang lain rahasia keluarga, kondisi kesehatan pasangan, atau persoalan sahabat. Dengan menggunakan istilah informasi privat, CPM mampu menjelaskan situasi ketika seseorang menyimpan atau membuka informasi yang sesungguhnya bukan sepenuhnya miliknya. Pergeseran istilah inilah yang di kemudian hari menjadi dasar bagi pembedaan peran antara CPM dan konsep pengungkapan diri dalam penelitian ini.

CPM berakar pada gagasan Irwin Altman mengenai pengaturan privasi. Altman memandang privasi bukan sebagai keadaan tertutup, melainkan sebagai proses pengaturan akses yang bergerak dinamis antara membuka dan menutup diri. Dalam pandangan ini, privasi bukan lawan dari keterbukaan, melainkan mekanisme yang mengatur kapan seseorang membuka dan kapan ia menutup. Seseorang yang sangat terbuka pun tetap menjalankan pengaturan privasi, sebab ia memilih kepada siapa keterbukaan itu ditujukan.

Dari gagasan tersebut, CPM mewarisi cara pandang dialektis. Ketegangan antara keinginan untuk berbagi dan kebutuhan untuk melindungi diri dipandang sebagai kondisi permanen dalam kehidupan relasional, bukan sebagai masalah yang harus dituntaskan. Manusia tidak pernah mencapai titik akhir ketika ketegangan itu selesai; yang dilakukannya adalah mengelola ketegangan tersebut secara terus-menerus, dengan hasil yang berbeda pada situasi yang berbeda. Cara pandang ini penting bagi penelitian ini, sebab ia mencegah peneliti membaca sikap korban yang kadang terbuka dan kadang menutup diri sebagai ketidakkonsistenan. Dalam kerangka CPM, tarik-menarik semacam itu justru merupakan wujud normal dari pengelolaan privasi yang sedang bekerja.

Metafora utama yang digunakan CPM adalah batas (*boundary*). Informasi privat digambarkan berada di dalam sebuah batas yang mengelilingi pemiliknya. Batas tersebut memiliki ketebalan yang dapat berubah: ketika batas menebal, informasi tertahan di dalam; ketika batas menipis, informasi mengalir keluar. Metafora ini memungkinkan CPM menjelaskan derajat keterbukaan secara lebih cermat dibandingkan perbedaan sederhana antara terbuka dan tertutup.

CPM berpijak pada sejumlah asumsi mengenai sifat dasar manusia dan kehidupan relasional. Asumsi-asumsi tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

1. Manusia adalah pembuat pilihan. Keputusan membuka atau menutup informasi dipandang sebagai pilihan yang dipertimbangkan, bukan reaksi otomatis. Bahkan diam pun merupakan pilihan yang diambil setelah menimbang berbagai kemungkinan.
2. Manusia adalah pembuat dan pengikut aturan. Pilihan membuka atau menutup tidak diambil secara acak pada setiap peristiwa, melainkan mengikuti aturan yang telah terbentuk sebelumnya, baik yang disadari maupun tidak.
3. Pilihan dan aturan mempertimbangkan pihak lain, bukan hanya diri sendiri. Seseorang menimbang bukan sekadar apa yang ia butuhkan, tetapi juga siapa yang akan menerima informasi tersebut dan apa yang mungkin dilakukannya.
4. Kehidupan relasional ditandai perubahan. Aturan privasi bukan sesuatu yang ditetapkan sekali untuk selamanya. Aturan tersebut disesuaikan seiring berubahnya hubungan, situasi, dan pengalaman.
5. Ketegangan dialektis merupakan kenyataan mendasar. Keinginan berbagi dan kebutuhan melindungi diri berlangsung bersamaan dan saling menarik, sehingga pengelolaan privasi tidak pernah benar-benar tuntas.

Kelima asumsi tersebut memiliki konsekuensi metodologis yang langsung bagi penelitian ini. Karena keputusan pengungkapan dipandang sebagai hasil pertimbangan yang mengikuti aturan, maka yang perlu digali dalam wawancara bukan sekadar apa yang diceritakan korban dan kepada siapa, melainkan

pertimbangan apa yang bekerja di balik keputusan tersebut. Pertanyaan wawancara karenanya perlu diarahkan pada penalaran korban, bukan semata pada kronologi peristiwa.

2.2.1 Prinsip Kepemilikan Informasi Privat

Prinsip pertama CPM menyatakan bahwa individu meyakini dirinya sebagai pemilik atas informasi privat mengenai dirinya, dan karena itu merasa berhak menentukan siapa yang boleh mengetahuinya. Informasi privat dipahami sebagai informasi mengenai hal-hal yang bermakna dalam bagi seseorang informasi yang apabila diketahui pihak lain dapat menempatkan pemiliknya dalam posisi rentan.

Gagasan kepemilikan ini merupakan penanda paling khas dari CPM. Dengan memperlakukan informasi sebagai sesuatu yang dimiliki, teori ini dapat berbicara mengenai hak, tanggung jawab, pelanggaran, dan bahkan perampasan kosakata yang tidak tersedia apabila informasi hanya dipandang sebagai pesan yang mengalir. Seseorang tidak sekadar merasa tidak nyaman ketika informasi pribadinya tersebar; ia merasa ada sesuatu miliknya yang diambil tanpa izin.

Bagi penelitian ini, prinsip kepemilikan memiliki kedudukan yang khusus. Pada kasus korban *deepfake*, terdapat persoalan kepemilikan yang berlapis. Lapisan pertama menyangkut wajah dan citra diri korban, yang tanpa persetujuannya telah digunakan pihak lain untuk memproduksi konten. Lapisan kedua menyangkut informasi mengenai peristiwa itu sendiri, yaitu fakta bahwa korban mengalami hal tersebut. Lapisan kedua inilah yang masih berada dalam kendali korban dan menjadi objek pengelolaan privasi. Pembedaan dua lapisan ini penting agar analisis tidak tertukar antara kehilangan kendali atas citra dan pengelolaan kendali atas cerita.

2.2.2 Kendali atas Informasi Privat melalui Aturan Privasi

Prinsip kedua menjelaskan mekanisme yang digunakan individu untuk menjalankan kepemilikannya, yaitu aturan privasi (*privacy rules*). Aturan privasi adalah pedoman yang dipakai seseorang untuk menentukan apakah suatu informasi boleh dibagikan, kepada siapa, dalam situasi seperti apa, dan sampai sejauh mana. Aturan ini dapat bersifat sangat sadar dan sengaja disusun, dapat pula bersifat rutin dan berjalan tanpa dipikirkan.

Petronio mengidentifikasi lima kriteria yang membentuk aturan privasi seseorang. Kelima kriteria tersebut jarang bekerja sendiri-sendiri; pada umumnya beberapa di antaranya bekerja bersamaan dan kadang saling bertentangan.

a. Kriteria Budaya

Setiap kebudayaan memiliki gagasan sendiri mengenai apa yang pantas dibicarakan dan apa yang sebaiknya disimpan. Kebudayaan yang menekankan keharmonisan kelompok dan nama baik keluarga cenderung menempatkan pengalaman yang dianggap memalukan sebagai informasi yang harus ditahan, sekalipun penahanan itu merugikan pemiliknya sendiri. Dalam konteks Indonesia, kriteria budaya diperkirakan berperan besar. Temuan Lewi dan Raras (2024) yang menunjukkan korban lebih memilih bercerita kepada teman dibandingkan kepada keluarga, dengan alasan cara pandang konservatif keluarga, merupakan gambaran nyata bekerjanya kriteria budaya dalam pembentukan aturan privasi.

b. Kriteria Gender

Kriteria gender merujuk pada perbedaan pola pengelolaan privasi yang terbentuk melalui sosialisasi peran gender. Perbedaan ini tidak dipahami sebagai sifat bawaan, melainkan sebagai hasil pembelajaran sosial mengenai apa yang pantas diungkapkan oleh laki-laki dan oleh perempuan. Dalam kasus kekerasan berbasis citra, kriteria gender bekerja dengan cara yang khas: perempuan korban tidak hanya menanggung peristiwanya, tetapi juga menanggung penilaian moral yang dilekatkan pada tubuhnya. Kriteria ini karenanya perlu digali secara khusus dalam wawancara.

c. Kriteria Motivasi

Kriteria motivasi berkaitan dengan dorongan personal di balik keputusan membuka atau menutup informasi. Dorongan tersebut dapat berupa kebutuhan memperoleh dukungan, keinginan meringankan beban emosional, kehendak memperingatkan orang lain agar tidak mengalami hal serupa, atau sebaliknya berupa keinginan melindungi orang terdekat dari kekhawatiran. Motivasi yang berbeda menghasilkan aturan yang berbeda pula terhadap peristiwa yang sama.

d. Kriteria Kontekstual

Kriteria kontekstual merujuk pada keadaan khusus yang mengubah perhitungan seseorang, misalnya peristiwa mendesak, perubahan situasi hidup, atau tekanan tertentu. Konteks dapat melonggarkan aturan yang biasanya ketat, misalnya ketika seseorang tiba-tiba menceritakan pengalamannya kepada orang yang tidak dikenal karena situasi menuntut demikian. Sebaliknya, konteks juga dapat memperketat aturan yang biasanya longgar.

e. Kriteria Rasio Manfaat dan Risiko

Kriteria ini merupakan bentuk perhitungan yang paling eksplisit. Individu menimbang keuntungan yang mungkin diperoleh dari membuka informasi terhadap kerugian yang mungkin ditanggung. Manfaat dapat berupa dukungan, bantuan praktis, atau kelegaan; risiko dapat berupa penilaian negatif, kerusakan hubungan, kehilangan pekerjaan, atau penyebaran lebih lanjut. Pada korban *deepfake* yang berprofesi sebagai content creator, perhitungan ini menjadi berlapis karena risikonya tidak berhenti pada ranah personal melainkan merambat ke ranah profesional.

Ringkasan kelima kriteria beserta arah penggaliannya dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.2 Kriteria Pembentuk Aturan Privasi dan Penerapannya dalam Penelitian

Kriteria	Penjelasan Ringkas	Arah Penggalan pada Kasus yang Diteliti
Budaya	Nilai bersama mengenai apa yang pantas dibicarakan dan apa yang harus ditahan.	Sejauh mana pertimbangan nama baik keluarga, rasa malu kolektif, dan norma kesopanan memengaruhi keputusan korban untuk diam atau bercerita.
Gender	Pola pengelolaan privasi yang terbentuk melalui sosialisasi peran gender.	Bagaimana penilaian moral yang dilekatkan pada tubuh perempuan memengaruhi perhitungan korban, termasuk kekhawatiran akan disalahkan.
Motivasi	Dorongan personal di balik keputusan membuka atau menutup.	Apakah korban bercerita untuk memperoleh dukungan, untuk memperingatkan orang lain, atau justru menahan cerita untuk melindungi orang terdekat.
Kontekstual	Keadaan khusus yang mengubah perhitungan pada situasi tertentu.	Peristiwa atau situasi apa yang membuat korban tiba-tiba bersedia bercerita, atau sebaliknya menarik diri setelah sebelumnya terbuka.
Rasio manfaat risiko	Penimbangan keuntungan terhadap kerugian yang mungkin timbul.	Bagaimana korban menimbang kelegaan dan dukungan terhadap risiko kehilangan pekerjaan, rusaknya reputasi, dan penyebaran lebih lanjut.

Sumber: diolah peneliti dari Petronio (2002) dan West & Turner (2020)

Selain kelima kriteria pembentuknya, aturan privasi juga memiliki sifat tertentu. Sebagian aturan diperoleh melalui pembelajaran sejak dini dalam keluarga dan lingkungan sosial, sehingga bersifat mapan dan berjalan hampir otomatis. Sebagian lain dibentuk secara khusus untuk menghadapi situasi baru yang belum pernah dialami. Aturan jenis kedua inilah yang diperkirakan mendominasi pengalaman korban *deepfake*, sebab peristiwa yang dialaminya tergolong baru dan belum tersedia pedoman sosial yang siap pakai untuk menghadapinya. Ketiadaan pedoman yang mapan ini berpotensi menjadi temuan tersendiri.

2.2.3 Kepemilikan Bersama dan Penjagaan Informasi

Prinsip ketiga menjelaskan apa yang terjadi setelah informasi dibagikan. Begitu seseorang menceritakan informasi privatnya kepada pihak lain, penerima tidak lagi berkedudukan sebagai pendengar semata melainkan berubah menjadi pemilik bersama (*co-owner*) atas informasi tersebut. Bersama kepemilikan itu melekat pula tanggung jawab untuk menjaganya. Dalam kerangka CPM, penerima informasi disebut sebagai penjaga informasi yang diharapkan mengikuti aturan yang ditetapkan pemilik aslinya.

Petronio membedakan beberapa kedudukan penerima informasi. Penerima yang dengan sengaja mencari dan meminta informasi disebut penerima yang disengaja (*deliberate confidant*), misalnya sahabat yang bertanya karena melihat ada yang tidak beres. Sebaliknya, penerima yang memperoleh informasi tanpa menghendaknya disebut penerima yang enggan (*reluctant confidant*), misalnya rekan kerja yang tanpa sengaja mengetahui persoalan tersebut. Dibedakan pula antara penerima yang memang diizinkan mengetahui dan penerima yang memperoleh informasi tanpa izin pemiliknya.

Pembedaan ini memiliki daya jelas yang tinggi untuk kasus yang diteliti. Pada peristiwa penyebaran konten *deepfake*, sebagian besar orang yang mengetahui peristiwa tersebut termasuk kategori penerima tanpa izin mereka mengetahuinya bukan karena korban bercerita, melainkan karena konten tersebut sampai kepada mereka. Situasi ini menciptakan kondisi yang tidak lazim: sejumlah besar pihak telah menjadi pemilik bersama atas informasi mengenai korban tanpa pernah menerima aturan apa pun dari korban. Dengan demikian, pengelolaan privasi yang dilakukan korban bukanlah pengelolaan sejak awal, melainkan upaya menata ulang situasi yang telah terlanjur kacau.

2.2.4 Koordinasi Batas

Agar kepemilikan bersama berjalan tanpa gesekan, diperlukan koordinasi batas. Petronio menjelaskan koordinasi tersebut berlangsung melalui tiga proses yang saling berkaitan.

a. Kaitan Batas (Boundary Linkage)

Kaitan batas merujuk pada proses masuknya pihak lain ke dalam batas privasi seseorang, sehingga terbentuk semacam persekutuan penjagaan informasi. Setiap kali seseorang menceritakan sesuatu, ia sesungguhnya sedang menarik pihak lain ke dalam lingkaran informasinya. Yang perlu dicermati dalam penelitian ini adalah siapa saja yang ditarik masuk oleh korban, atas dasar pertimbangan apa, dan bagaimana urutannya.

b. Permeabilitas Batas (Boundary Permeability)

Permeabilitas batas merujuk pada seberapa banyak informasi yang diizinkan mengalir keluar. Batas yang tebal hanya meloloskan sedikit informasi, sedangkan batas yang tipis meloloskan banyak. Konsep ini memungkinkan analisis yang lebih halus daripada sekadar menyatakan korban terbuka atau tertutup, sebab korban dapat menerapkan ketebalan batas yang berbeda kepada pihak yang berbeda pada waktu yang bersamaan.

c. Kepemilikan Batas (Boundary Ownership)

Kepemilikan batas berkaitan dengan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pemilik bersama. Persoalan muncul ketika hak dan kewajiban tersebut tidak dinyatakan secara jelas, misalnya ketika korban bercerita tanpa menegaskan bahwa cerita tersebut tidak boleh diteruskan. Ketidakjelasan semacam ini merupakan salah satu pemicu turbulensi yang paling sering terjadi.

Selain ketiga proses tersebut, CPM juga membedakan tingkatan batas. Batas personal mencakup informasi yang hanya diketahui pemiliknya. Batas diadik terbentuk ketika informasi dibagikan kepada satu pihak lain. Batas kolektif terbentuk ketika informasi dimiliki bersama oleh sekelompok

orang, misalnya keluarga atau lingkungan kerja. Semakin banyak pihak yang berada di dalam suatu batas, semakin sulit koordinasi dilakukan dan semakin besar kemungkinan terjadinya turbulensi. Pada kasus yang diteliti, penyebaran konten di media sosial menyebabkan informasi melompat langsung dari batas personal ke batas kolektif yang sangat luas tanpa melewati tahapan di antaranya sebuah lompatan yang belum banyak dibahas dalam literatur CPM.

2.2.5 Turbulensi Batas Privasi

Prinsip kelima menjelaskan keadaan ketika koordinasi batas gagal dan informasi bergerak dengan cara yang tidak dikehendaki pemiliknya. Keadaan ini disebut turbulensi batas privasi (*boundary turbulence*). Turbulensi ditandai munculnya rasa terganggu, kehilangan kendali, kemarahan, atau kecemasan pada pemilik informasi, dan biasanya diikuti upaya menata ulang aturan.

Petronio mengidentifikasi beberapa penyebab turbulensi, di antaranya sebagai berikut.

1. Aturan yang kabur, yaitu ketika pemilik informasi tidak pernah menyatakan secara jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan penerima terhadap informasi tersebut.
2. Pelanggaran aturan yang disengaja, yaitu ketika penerima mengetahui aturannya namun tetap meneruskan informasi tersebut kepada pihak lain.
3. Kekeliruan penerapan aturan, yaitu ketika penerima salah menafsirkan sejauh mana informasi boleh diteruskan.
4. Perbedaan orientasi privasi, yaitu ketika pemilik dan penerima memiliki gagasan yang berbeda mengenai apa yang tergolong pribadi.
5. Dilema privasi, yaitu ketika penerima menghadapi situasi yang memaksanya memilih antara menjaga kerahasiaan dan melindungi keselamatan pemilik informasi.

Terhadap turbulensi yang terjadi, pemilik informasi dapat menempuh sejumlah respons, antara lain menata ulang aturan agar lebih ketat, menarik diri dari

pihak yang dianggap tidak dapat dipercaya, menegur atau menjatuhkan sanksi sosial, merundingkan ulang kesepakatan, atau justru melepaskan kendali karena menilai upaya mempertahankannya sudah tidak berguna.

Bagi penelitian ini, prinsip kelima memiliki kedudukan paling penting sekaligus paling menarik. Dalam penjelasan baku CPM, turbulensi ditempatkan sebagai akibat yang muncul di ujung rangkaian: seseorang memiliki informasi, menyusun aturan, membagikannya, lalu koordinasi gagal dan terjadilah turbulensi. Pada kasus korban *deepfake*, urutan tersebut berpotensi terbalik. Turbulensi terjadi lebih dahulu konten tersebar tanpa sepengetahuan korban dan justru dari titik itulah korban mulai menyusun aturan privasi. Dengan kata lain, aturan privasi dibentuk sebagai respons terhadap turbulensi, bukan sebaliknya. Kemungkinan pembalikan urutan inilah yang akan diuji melalui teknik pencocokan pola sebagaimana diuraikan pada Subbab 3.7.

2.2.6 Perkembangan dan Kritik terhadap Teori

Sejak diperkenalkan, CPM telah diterapkan secara luas pada berbagai konteks, mulai dari komunikasi keluarga, komunikasi kesehatan, hubungan kerja, hingga interaksi di media sosial. Petronio sendiri menempatkan CPM sebagai teori yang berorientasi pada penerapan praktis, dalam arti dirancang agar dapat digunakan untuk memahami dan memperbaiki persoalan nyata, bukan semata untuk kepentingan penjelasan akademik.

Meskipun demikian, sejumlah keterbatasan perlu dicatat. Pertama, CPM dikembangkan dalam konteks masyarakat Barat, sehingga penerapannya pada masyarakat yang lebih menekankan kolektivitas memerlukan kehati-hatian. Dalam masyarakat yang menempatkan nama baik keluarga di atas kepentingan individu, gagasan bahwa individu adalah pemilik tunggal atas informasi mengenai dirinya tidak selalu berlaku sepenuhnya. Kedua, sebagian besar penerapan CPM mengandaikan bahwa informasi tersebar melalui rantai antarpribadi yang dapat ditelusuri. Pada penyebaran di ruang digital, penyebaran berlangsung serentak, anonim, dan tidak dapat dilacak, sehingga konsep koordinasi batas menghadapi

tantangan baru. Ketiga, CPM lebih banyak menjelaskan bagaimana proses berlangsung dibandingkan memerikan seperti apa wujud pengungkapan yang dihasilkannya keterbatasan terakhir inilah yang menjadi alasan digunakannya konsep pengungkapan diri sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

2.3 Landasan Konsep

Landasan konsep memuat prinsip dasar dan terminologi yang digunakan sebagai perangkat pemahaman dalam penelitian ini. Berbeda dengan landasan teori yang berfungsi menjelaskan mekanisme berlangsungnya suatu proses, landasan konsep berfungsi menyediakan definisi dan pembedaan yang diperlukan agar objek penelitian dapat dikenali secara tepat. Empat kelompok konsep diuraikan berikut ini, yaitu *deepfake* dan peniruan identitas, kekerasan berbasis citra, pengungkapan diri, serta stigma dan penyalahan korban.

2.3.1 *Deepfake* dan Peniruan Identitas

a. Pengertian dan Cara Kerja

Deepfake merupakan istilah gabungan dari deep learning dan fake, yang merujuk pada konten visual maupun audio hasil manipulasi kecerdasan buatan sehingga tampak menyerupai individu tertentu secara realistis (Chesney & Citron, 2019; Verdoliva, 2020). Secara teknis, konten semacam ini dihasilkan melalui pelatihan model pembelajaran mesin terhadap sejumlah citra wajah, sehingga model tersebut mampu menghasilkan wajah baru atau memindahkan wajah seseorang ke tubuh orang lain. Yang perlu digarisbawahi dalam kerangka penelitian ini bukanlah kerumitan teknisnya, melainkan konsekuensi sosialnya: kemampuan teknologi ini telah menyebabkan citra visual kehilangan kedudukannya sebagai bukti yang dapat dipercaya begitu saja.

Chesney dan Citron (2019) menyoroti dampak turunan dari kondisi tersebut, yaitu munculnya keuntungan bagi pihak yang berdusta (liar's dividend). Ketika publik menyadari bahwa citra dapat dipalsukan, pihak

yang bersalah memperoleh peluang untuk menyangkal bukti otentik dengan dalih bahwa bukti tersebut merupakan hasil manipulasi. Bagi korban, keadaan ini bekerja secara terbalik dan justru merugikan: korban harus meyakinkan orang lain bahwa konten yang beredar memang palsu, sementara pada saat yang sama keraguan publik terhadap keaslian citra tidak otomatis berpihak kepadanya.

b. Tipologi Deepfake

Berdasarkan cara pembuatan dan sasarannya, konten manipulatif ini dapat dibedakan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3 Tipologi *Deepfake* Berdasarkan Cara Pembuatan dan Sasaran

Jenis	Cara Kerja	Implikasi bagi Individu yang Dicatut
Pertukaran wajah (face swap)	Wajah seseorang dipindahkan ke tubuh orang lain dalam foto atau video.	Paling merugikan secara personal karena wajah yang dikenali publik melekat pada perbuatan yang tidak pernah dilakukan.
Penyelarasan bibir (lip sync)	Gerakan bibir diselaraskan dengan rekaman suara yang berbeda.	Menempatkan ucapan yang tidak pernah diucapkan ke dalam mulut seseorang.
Pengendalian ekspresi (puppet master)	Ekspresi dan gerak tubuh seseorang dikendalikan mengikuti pemeran lain.	Menghasilkan perilaku yang tidak pernah ditampilkan oleh individu bersangkutan.
Sintesis suara	Suara seseorang ditiru untuk mengucapkan kalimat baru.	Banyak dimanfaatkan untuk penipuan yang mengatasnamakan orang terdekat.
Wajah sepenuhnya sintetis	Wajah dibangkitkan tanpa merujuk pada individu nyata mana pun.	Tidak menimbulkan korban individual karena tidak ada identitas yang dicatut.

Sumber: diolah peneliti dari Chesney & Citron (2019) dan Verdoliva (2020)

c. Deepfake Berbasis Peniruan Identitas

Dari tipologi tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada *deepfake* berbasis peniruan identitas, yaitu manipulasi yang memanfaatkan identitas individu yang benar-benar ada tanpa sepengetahuan dan persetujuannya. Perbedaan utamanya dari wajah sepenuhnya sintetis terletak pada keberadaan korban. Ketika wajah yang digunakan adalah wajah orang nyata, kerugian tidak berhenti pada persoalan disinformasi publik melainkan menjelma menjadi kerugian personal yang melekat pada tubuh, nama, dan relasi sosial seseorang. Dalam kasus yang diteliti, bentuk yang terjadi adalah pertukaran wajah yang diarahkan pada konten bermuatan seksual.

2.3.2 Kekerasan Berbasis Citra dan Kekerasan Berbasis Gender Online

Ketika manipulasi citra diarahkan pada konten bermuatan seksual, peristiwa tersebut tidak lagi tepat dipahami semata sebagai penyalahgunaan teknologi, melainkan sebagai bentuk kekerasan. Dalam literatur internasional, bentuk ini dikenal sebagai kekerasan seksual berbasis citra (*image-based sexual abuse*), yang mencakup pembuatan, penyebaran, maupun ancaman penyebaran citra bermuatan seksual tanpa persetujuan individu yang ditampilkan (Flynn dkk., 2025; Mclocklin dkk., 2024). Dalam konteks Indonesia, bentuk ini termasuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender Online.

Terdapat perbedaan penting antara kekerasan berbasis citra konvensional dan kekerasan berbasis citra sintetis. Pada bentuk konvensional, citra yang disebarluaskan merupakan citra otentik yang semula dibuat atau dibagikan dalam konteks privat. Pada bentuk sintetis, citra tersebut sama sekali tidak pernah ada; ia diproduksi dari bahan mentah berupa foto biasa yang tersedia di ruang publik. Perbedaan ini membawa dua konsekuensi. Pertama, kerentanan meluas kepada siapa pun yang memiliki foto wajah di ruang digital, tanpa memerlukan kelalaian apa pun dari pihak korban. Kedua, korban menanggung beban tambahan berupa keharusan membuktikan bahwa konten tersebut palsu — beban yang tidak dihadapi korban

kekerasan berbasis citra konvensional. Beban pembuktian inilah yang diperkirakan turut membentuk perhitungan korban dalam memutuskan pengungkapan.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I, Komnas Perempuan (2026) mencatat Kekerasan Berbasis Gender Online sebagai bentuk kekerasan ranah publik yang paling dominan sepanjang 2025, dengan mayoritas kasus bermuatan seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang diteliti bukan peristiwa terisolasi, melainkan bagian dari pola yang berulang dan berskala luas.

2.3.3 Pengungkapan Diri (*Self-Disclosure*)

a. Pengertian

Joseph A. DeVito memahami pengungkapan diri sebagai bentuk komunikasi ketika seseorang menyampaikan informasi mengenai dirinya yang dalam keadaan biasa cenderung disimpan. Terdapat tiga unsur yang melekat pada pengertian tersebut. Pertama, informasi yang disampaikan merupakan informasi mengenai diri sendiri. Kedua, informasi tersebut sebelumnya tidak diketahui pihak lain. Ketiga, penyampaiannya berlangsung dalam kerangka komunikasi antarpribadi. Pengungkapan diri dalam pengertian ini tidak diukur dari banyaknya kata yang diucapkan, melainkan dari kadar kerentanan yang ditanggung pembicara ketika mengucapkannya.

b. Jendela Johari sebagai Kerangka Pemetaan

Untuk menggambarkan kedudukan pengungkapan diri, DeVito merujuk pada Jendela Johari yang membagi wilayah pengetahuan mengenai diri ke dalam empat bagian, yaitu wilayah terbuka, wilayah buta, wilayah tersembunyi, dan wilayah tidak diketahui. Pengungkapan diri dipahami sebagai proses yang memindahkan informasi dari wilayah tersembunyi ke wilayah terbuka. Kerangka ini bermanfaat untuk penelitian ini, namun perlu digunakan secara hati-hati. Pada kasus korban *deepfake*, perpindahan informasi tidak dilakukan oleh korban sendiri; sebagian isi wilayah tersembunyi dipindahkan secara paksa ke wilayah terbuka oleh pihak lain.

Dengan demikian, yang tersisa untuk dikelola korban adalah penafsiran atas informasi yang sudah terbuka tersebut, bukan lagi keputusan untuk membukanya.

c. Dimensi Pengungkapan Diri

DeVito menguraikan lima dimensi yang dapat digunakan untuk memerikan kualitas suatu pengungkapan diri. Kelima dimensi inilah yang menjadi perangkat utama untuk menjawab Pertanyaan Penelitian kedua.

Tabel 2.4 Lima Dimensi Pengungkapan Diri dan Penerapannya dalam Penelitian

Dimensi	Penjelasan	Penerapan pada Kasus yang Diteliti
Kesengajaan (intention)	Sejauh mana pengungkapan dilakukan secara sadar dan direncanakan, bukan terlepas begitu saja.	Apakah korban merencanakan lebih dulu apa yang akan diceritakannya, ataukah cerita keluar karena terdesak pertanyaan orang lain.
Jumlah (amount)	Keluasan informasi yang disampaikan, mencakup banyaknya topik dan lamanya penyampaian.	Seberapa banyak bagian dari peristiwa yang diceritakan korban, dan bagian mana yang secara konsisten tidak pernah disinggung.
Nilai rasa (valence)	Nada positif atau negatif dari informasi yang disampaikan.	Apakah korban menuturkan pengalamannya dengan nada getir, netral, atau justru membingkainya sebagai pengalaman yang menguatkan.
Ketepatan dan kejujuran (accuracy and honesty)	Sejauh mana informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan yang dialami.	Apakah korban menyampaikan peristiwa apa adanya, memperhalus sebagian bagian, atau menyunting cerita agar terdengar lebih ringan.
Kedalaman (intimacy)	Tingkat keintiman informasi, dari sekadar keterangan permukaan hingga hal yang paling personal.	Apakah korban berhenti pada kronologi peristiwa, ataukah masuk hingga ke perasaan dan dampak terdalam yang ditanggungnya.

Sumber: diolah peneliti dari DeVito (2019)

d. Faktor yang Memengaruhi Pengungkapan Diri

DeVito mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi kesediaan seseorang melakukan pengungkapan diri, di antaranya sebagai berikut.

1. Efek diadik. Seseorang cenderung lebih terbuka kepada pihak yang lebih dahulu bersikap terbuka kepadanya. Keterbukaan menular dan bersifat saling.
2. Besaran audiens. Pengungkapan lebih mudah dilakukan kepada satu orang dibandingkan kepada banyak orang sekaligus, sebab kendali atas informasi lebih terasa pada kelompok kecil.
3. Topik pembicaraan. Topik yang dianggap memalukan atau menyimpang dari norma cenderung lebih ditahan dibandingkan topik netral.
4. Hubungan dengan penerima. Kedekatan, kepercayaan, dan riwayat hubungan menentukan sejauh mana seseorang bersedia terbuka.
5. Saluran komunikasi. Perantaraan teknologi dapat memudahkan pengungkapan karena mengurangi ketegangan tatap muka, namun sekaligus memperbesar risiko penyebaran ulang.

Sekilas, faktor-faktor tersebut tampak beririsan dengan kriteria pembentuk aturan privasi dalam CPM. Keduanya sesungguhnya bekerja pada tataran yang berbeda. Faktor menurut DeVito bekerja pada tataran situasi komunikasi yang sedang berlangsung; ia menjelaskan mengapa suatu percakapan tertentu berjalan lebih terbuka atau lebih tertutup. Kriteria dalam CPM bekerja pada tataran aturan yang mendahului dan mengatur situasi tersebut; ia menjelaskan pedoman yang dibawa seseorang ke dalam setiap percakapan. Dengan kata lain, CPM menjelaskan pedoman yang dimiliki, sedangkan DeVito menjelaskan pelaksanaan pedoman itu pada peristiwa tertentu. Kedua tataran tersebut saling melengkapi dan tidak saling menggantikan.

e. Imbalan dan Risiko Pengungkapan Diri

DeVito menegaskan bahwa pengungkapan diri selalu mengandung dua sisi. Pada sisi imbalan, pengungkapan dapat menghadirkan pemahaman diri yang lebih baik, keringanan beban emosional, kemampuan menghadapi persoalan yang meningkat, serta hubungan yang menjadi lebih dalam. Pada sisi risiko, pengungkapan dapat mendatangkan kerugian personal berupa penolakan dan rasa malu, kerugian relasional berupa renggangnya hubungan, serta kerugian profesional berupa terganggunya pekerjaan dan reputasi. Bagi korban *deepfake* yang berprofesi sebagai content creator, ketiga jenis risiko tersebut hadir sekaligus, dan risiko profesional berpotensi menjadi yang paling menentukan karena menyangkut kelangsungan kehidupannya.

2.3.4 Stigma dan Penyalahan Korban

Keputusan pengungkapan tidak diambil dalam ruang hampa, melainkan di dalam lingkungan sosial yang tidak netral. Stigma dipahami sebagai atribut yang merendahkan kedudukan sosial seseorang di mata lingkungannya, sehingga yang bersangkutan tidak lagi dipandang secara utuh melainkan melalui atribut tersebut. Pada korban kekerasan berbasis citra, stigma bekerja dengan cara yang khas: yang dinilai bukan perbuatan pelaku, melainkan tubuh dan perilaku korban.

Bentuk stigma yang paling langsung berpengaruh pada keputusan pengungkapan adalah penyalahan korban (*victim blaming*), yaitu kecenderungan mempersoalkan tindakan korban alih-alih perbuatan pelaku. Dalam konteks kekerasan berbasis citra, penyalahan korban sering muncul dalam bentuk pertanyaan mengenai mengapa korban mengunggah fotonya, mengapa berpakaian dengan cara tertentu, atau mengapa aktif di media sosial. Lewi dan Raras (2024) menemukan bahwa kekhawatiran akan disalahkan, terutama oleh keluarga, merupakan salah satu alasan utama korban memilih menutup informasi. Temuan Mclocklin dkk. (2024) memperkuat gambaran tersebut dengan menunjukkan

bahwa antisipasi penghakiman dan pengalaman negatif pada pengungkapan sebelumnya menjadi hambatan berlapis bagi korban dalam mencari bantuan.

Dalam kerangka CPM, stigma dan penyalahan korban tidak berdiri di luar teori melainkan masuk sebagai isi dari perhitungan aturan privasi, khususnya melalui kriteria budaya dan kriteria rasio manfaat–risiko. Dengan kata lain, stigma bukan sekadar latar sosial yang menyertai peristiwa, melainkan bahan pertimbangan yang secara langsung membentuk keputusan korban untuk berbicara atau diam.

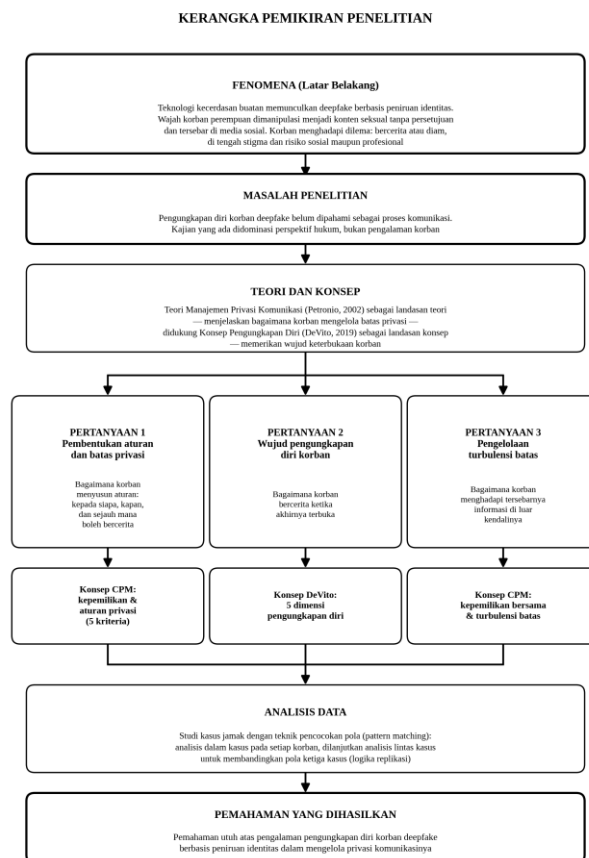
2.3.5 Content Creator dan Kerentanan Citra Visual

Content creator dipahami sebagai individu yang memproduksi dan mendistribusikan konten di media sosial secara berkelanjutan, dan yang sebagian atau seluruh kehidupannya bergantung pada aktivitas tersebut. Ciri khas profesi ini adalah kedudukan citra diri sebagai modal kerja. Wajah, gaya, dan kehadiran personal bukan sekadar atribut pribadi melainkan bagian dari nilai ekonomi yang dipertaruhkan.

Ciri tersebut menciptakan kerentanan berlapis pada kasus manipulasi citra. Pertama, kerentanan teknis: ketersediaan ratusan hingga ribuan foto wajah di akun publik menyediakan bahan mentah yang berlimpah bagi pembuatan konten manipulatif. Kedua, kerentanan ekonomi: menarik diri dari ruang digital sebagai upaya perlindungan berarti kehilangan sumber penghasilan. Ketiga, kerentanan relasional: hubungan dengan audiens yang selama ini dibangun atas dasar keterbukaan justru menyulitkan korban untuk menutup diri tanpa menimbulkan pertanyaan. Ketiga lapis kerentanan inilah yang menjadikan kasus *content creator* layak diperlakukan sebagai kasus yang mengungkap, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 3.3.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menghubungkan landasan teori dan landasan konsep yang telah diuraikan dengan persoalan penelitian, serta memperlihatkan bagaimana keduanya bekerja bersama untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Pembagian peran antara keduanya ditegaskan sebagai berikut: teori Manajemen Privasi Komunikasi menjelaskan proses, yaitu bagaimana kepemilikan informasi dimaknai, bagaimana aturan privasi dibentuk, dan bagaimana turbulensi dihadapi; sedangkan konsep pengungkapan diri menjelaskan wujud, yaitu seperti apa rupa pengungkapan yang akhirnya dilakukan. Konsep *deepfake* dan kekerasan berbasis citra berfungsi memerikan objek yang dipersoalkan, sementara konsep stigma dan penyalahan korban berfungsi memerikan lingkungan sosial tempat keputusan tersebut diambil. Keterkaitan seluruh unsur tersebut digambarkan pada Gambar 2.1 dan diuraikan pada penjelasan yang mengikutinya.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: diolah peneliti (2026)

Alur kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Fenomena. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan memunculkan deepfake berbasis peniruan identitas. Wajah korban perempuan dimanipulasi menjadi konten bermuatan seksual tanpa persetujuannya dan tersebar di media sosial, sehingga korban menghadapi dilema untuk bercerita atau diam di tengah stigma serta risiko sosial dan profesional.
2. Masalah penelitian. Pengungkapan diri korban deepfake belum dipahami sebagai proses komunikasi, karena kajian yang tersedia masih didominasi perspektif hukum dan belum menempatkan pengalaman korban sebagai pusat pembahasan.
3. Teori dan konsep. Masalah tersebut dibaca menggunakan Teori Manajemen Privasi Komunikasi (Petronio, 2002) sebagai landasan teori yang menjelaskan bagaimana korban mengelola batas privasi, didukung Konsep Pengungkapan Diri (DeVito, 2019) sebagai landasan konsep yang memerikan wujud keterbukaan korban.
4. Tiga pertanyaan penelitian. Kerangka teori dan konsep tersebut diturunkan menjadi tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai pembentukan aturan dan batas privasi, dijawab dengan konsep kepemilikan dan aturan privasi beserta lima kriterianya. Pertanyaan kedua mengenai wujud pengungkapan diri, dijawab dengan lima dimensi pengungkapan diri DeVito. Pertanyaan ketiga mengenai pengelolaan turbulensi batas, dijawab dengan konsep kepemilikan bersama dan turbulensi batas.
5. Analisis data. Data dari ketiga kasus diolah menggunakan teknik pencocokan pola (*pattern matching*), yaitu analisis dalam kasus pada masing-masing korban, dilanjutkan analisis lintas kasus untuk membandingkan pola ketiga kasus berdasarkan logika replikasi.

Pemahaman yang dihasilkan. Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut disatukan menjadi pemahaman utuh mengenai pengalaman pengungkapan diri korban deepfake berbasis peniruan identitas dalam mengelola privasi komunikasinya.